



TINJAUAN APBD DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA UTARA

Feby Milanie¹, Miftah El Fikri², Elvira Seftiani Syahfitri³

Universitas Pembangunan Panca Budi
febymellanie@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the Regency/City APBD in North Sumatra in terms of the ratio of regional financial independence. The data used in this study is secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA) for 33 district/city governments in North Sumatra province for 2018-2020, obtained from the official website of the Directorate General of State Fiscal Balance (DJPB). The data analysis technique used descriptive financial ratio analysis. The results of this study reveal that it can be seen that the level of regional independence in the province of North Sumatra is very low when viewed from the average of 33 regencies/cities, which is 8.88%. If it is related to the relationship pattern and the level of regional independence, the level of independence of the regency/city regional government in North Sumatra province is classified in the very low independence category with an instructive relationship pattern. Regency/city regional government in North Sumatra province.

Keywords: APBD, Regional Independence, Development

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, juga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Dari Undang-Undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan bahwa APBD sebagai suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam waktu satu tahun anggaran



tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif/asosiatif. Menurut Rusiadi, dkk (2014: 12) “pendekatan penelitian kualitatif/asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan adalah data dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah pengumpulan data dan dokumen-dokumen dan catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data dalam penelitian ini berasal dari data Laporan Realisasi APBD pemerintahan daerah di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2020. Data tersebut didapatkan melalui pencatatan ataupun softcopy atas data-data yang diperlukan yang diperoleh dari website/situs resmi BPS dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 33 pemerintahan daerah yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota. Teknik dalam pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2018:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Berdasarkan hal tersebut, didapatkan sebanyak 33 sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama 2018- 2020 (Lampiran 2) dengan 99 unit analisis observasi (33 x 3).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Menurut Situmorang dan Lufti (2015) analisis deskripsi merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Analisis deskripsi ini meliputi beberapa hal sub menu salah satunya adalah analisis rasio. Data diidentifikasi dan dilakukan perhitungan analisis rasio keuangan berdasarkan indikator/rumus yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam penelitian. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyajikan hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara periode 2018-2020 menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$



Tabel 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Keterangan	2018	2019	2020	Rata-rata	Klasifikasi	Peringkat
1	Kabupaten Asahan	6,55%	7,51%	3,49%	5,85%	Rendah Sekali	19
2	Kabupaten Dairi	7,51%	7,08%	6,84%	7,14%	Rendah Sekali	15
3	Kabupaten Deli Serdang	21,52%	22,73%	22,57%	22,27%	Rendah Sekali	2
4	Kabupaten Tanah Karo	7,77%	6,34%	7,37%	7,16%	Rendah Sekali	14
5	Kabupaten Labuhan Batu	14,64%	11,08%	10,94%	12,22%	Rendah Sekali	5
6	Kabupaten Langkat	6,85%	6,46%	6,37%	6,56%	Rendah Sekali	17
7	Kabupaten Mandailing Natal	3,81%	5,54%	5,20%	4,85%	Rendah Sekali	23
8	Kabupaten Nias	14,44%	11,43%	11,26%	12,38%	Rendah Sekali	4
9	Kabupaten Simalungun	6,23%	6,15%	6,35%	6,24%	Rendah Sekali	8
10	Kabupaten Tapanuli Selatan	12,02%	11,17%	6,77%	9,99%	Rendah Sekali	0
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	7,03%	7,11%	7,19%	7,11%	Rendah Sekali	6
12	Kabupaten Tapanuli Utara	7,87%	8,00%	8,59%	8,15%	Rendah Sekali	2
13	Kabupaten Toba Samosir	3,54%	3,73%	5,88%	4,38%	Rendah Sekali	6
14	Kota Binjai	9,83%	10,23%	11,22%	10,43%	Rendah Sekali	9
15	Kota Medan	52,08%	53,79%	55,37%	53,75%	Sedang	1
16	Kota Pematang Siantar	12,21%	12,01%	10,35%	11,52%	Rendah Sekali	7
17	Kota Sibolga	11,30%	11,01%	12,35%	11,55%	Rendah Sekali	6
18	Kota Tanjung Balai	11,21%	11,06%	10,88%	11,05%	Rendah Sekali	8
19	Kota Tebing Tinggi	13,45%	14,10%	15,32%	14,29%	Rendah Sekali	3
20	Kota Padang Sidempuan	8,51%	9,61%	10,61%	9,58%	Rendah Sekali	1
21	Kabupaten Pakpak Bharat	3,43%	3,47%	3,79%	3,57%	Rendah Sekali	9
22	Kabupaten Nias Selatan	2,04%	1,88%	1,64%	1,85%	Rendah Sekali	3
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	4,26%	4,77%	4,95%	4,66%	Rendah Sekali	5



24	Kabupaten Serdang Bedagai	7,38%	6,74%	8,15%	7,43%	Rendah Sekali	3	1
25	Kabupaten Samosir	6,39%	5,32%	5,31%	5,67%	Rendah Sekali	1	2
26	Kabupaten Batu Bara	5,43%	5,94%	5,75%	5,70%	Rendah Sekali	0	2
27	Kabupaten Padang Lawas	5,12%	5,08%	4,11%	4,77%	Rendah Sekali	4	2
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	3,81%	3,74%	2,99%	3,51%	Rendah Sekali	0	3
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	5,64%	4,63%	5,06%	5,11%	Rendah Sekali	2	2
30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	4,36%	4,21%	4,51%	4,36%	Rendah Sekali	7	2
31	Kabupaten Nias Utara	1,44%	2,90%	3,64%	2,66%	Rendah Sekali	2	3
32	Kabupaten Nias Barat	2,84%	3,21%	3,19%	3,08%	Rendah Sekali	1	3
33	Kota Gunung Sitoli	3,90%	4,07%	4,31%	4,09%	Rendah Sekali	8	2

Tabel 1 menampilkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara periode 2018-2020 yang fluktuatif. Terdapat 16 pemda yang menunjukkan peningkatan kemandirian daerah pada tahun 2019 dan 17 pemda mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 16 pemda mengalami penurunan kemandirian dan 17 pemda mengalami peningkatan kemandirian. Berdasarkan rata-rata, pemda kabupaten/kota yang menduduki tingkat kemandirian peringkat pertama adalah kota Medan dengan nilai rata-rata 53,75%, sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang menduduki tingkat kemandirian pada peringkat terakhir adalah kabupaten Nias Selatan dengan nilai rata-rata 1,85%.

Berdasarkan hasil analisis rasio pada Tabel 1 dapat diketahui tingkat kemandirian daerah di provinsi Sumatera Utara rendah sekali jika dilihat dari rata-rata 33 kabupaten/kota yaitu sebesar 8,88%. Jika dihubungkan dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah (Tabel 2.1) maka tingkat kemandirian pemerintahan daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara tergolong dalam kategori kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Namun jika dilihat per pemda, kota Medan adalah pemda yang memiliki kemandirian tertinggi (rata-rata 53,75%) dari 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dengan kemandirian dikategorikan sedang dengan pola hubungan partisipatif. Hubungan partisipatif dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Subbab 4.2 melalui analisis rasio dan uji beda dalam menilai kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara periode tahun 2014-2016 dapat ditarik kesimpulan Kinerja keuangan pemda kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemda kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara rata-rata rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Namun jika dilihat per pemda, kota Medan memiliki



tingkat kemandirian tertinggi dari 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara dengan kemandirian dikategorikan sedang dengan pola hubungan partisipatif, sedangkan pemda dengan tingkat kemandirian terendah adalah kabupaten Nias Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Dwi Jatnika, 2016. "Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013", *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, Vol.4, No.2, Hal. 1021-1034, ISSN 2338-1507.
- Badrudin, Rudy, 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Batafor, Gregorius Gehi, 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata – Provinsi NTT*, Tesis, Universitas Udayana, Denpasar.
- Dharmawati, Mentari Kurnia dan Ririn Irmadariyani, 2016. "Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi", *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, Hal. 1-5.
- Dwijayanti, Retno dan Rusherlistyanti, 2013. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.12, No.01, Hal. 43-66, ISSN 1693-0908.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto, 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrua*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2008. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, Edisi 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indriantoro dan Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi 1, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Korompot, Riska dan Jessy Warongan, 2017. "Analysis of Financial Performance in the Government of North Sulawesi", *Jurnal Accountability*, Vol.06, No.02, Hal. 09-19.
- Magdalena, Marissa dan Heni Kurniawan, Ch, 2013. "Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia", *MODUS*, Vol.25, No.2, Hal. 91-106, ISSN 0852-1875.